



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARBINI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
3. NHK : 979550

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.230.500.000

1. Tanah Seluas 345 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 138.000.000
2. Tanah Seluas 975 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 292.500.000
3. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 168 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 84.000.000

1. MOTOR, HONDA MF 125 TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N12M2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N26L2A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA D1B02N26L2A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.448.250
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.329.948.250
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.329.948.250

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.